



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : BANK INDONESIA (BI)

UNIT KERJA : DEPARTEMEN LAYANAN ASET UMUM DAN FASILITAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **EVA ADERIA SIMANJUNTAK**
2. Jabatan : **KEPALA DEPARTEMEN**
3. NHK : **271721**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 17.543.250.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 180 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 5.250.000.000
2. Tanah Seluas 1.541 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.271.325.000
3. Tanah Seluas 1.573 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.297.725.000
4. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , Rp. 2.070.000.000
5. Tanah Seluas 529 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.216.700.000
6. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA JEMBRANA, HASIL SENDIRI Rp. 437.500.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 467 m2/467 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 227.000.000**

1. MOTOR, VESPA SPRINT SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
2. MOBIL, MAZDA SUV Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 3.290.000.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.747.968.657
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	24.808.218.657
III. HUTANG	Rp.	626.232.878
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	24.181.985.779

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.